Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3363-3369
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4067

Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo

Wildan Arya Wicaksana, Wiwin Priana Primandhana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondence: aryawicaks10@gmail.com, wiwinpriana10@gmail.com

Abstrak. Kemiskinan adalah status masyarakat dimana masyarakat tak mampu menggenapkan keperluan pokok hariannya. Kabupaten Probolinggo menyandang jumlah penduduk miskin yang tinggi dan tertingi keempat Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, diperlukannya peranan pemerintah dalam membasmi persoalan kemiskinan itu. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat kaitan pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Data *time series* dari tahun 2011-2021 adalah data yang digunakan di penelitian ini yang didapat dari situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda model ialah metode dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.

Kata kunci: kemiskinan, pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan.

Abstract. *Poverty is a social status where people are unable to fulfill their basic daily needs. Probolinggo Regency has the highest number of poor people and is the fourth highest in East Java Province. For this reason, the role of the government is needed in eradicating the problem of poverty. The aim of this research was to see the relationship between per capita income, government spending in the education sector, and government spending in the health sector on the number of poor people in Probolinggo Regency. Time series data from 2011-2021 is the data used in this study which was obtained from the website of the Central Bureau of Statistics for East Java Province and Probolinggo Regency, the Probolinggo Regency Education Office and the Indonesian Ministry of Education and Culture, as well as the Health Office for East Java Province and Probolinggo Regency. A quantitative approach using multiple linear regression analysis models is the method in this study. The results obtained show that per capita income and government spending on the education sector have a negative and significant effect on the number of poor people in Probolinggo Regency. Meanwhile, government expenditure in the health sector has a negative and insignificant effect on the number of poor people in Probolinggo District.*

Keywords **:** *education sector, health sector government spending, poverty, per capita income.*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi negara berkembang yaitu terkait kemiskinan. Negara Indonesia adalah negara berkembang dan masih termasuk ke dalam negara yang masih diselimuti kemiskinan (Arifin, 2019). Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat menikmati berbagai pilihan untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti kesehatan yang rendah, kehidupan yang baik, kebebasan, dan penghormatan antar sesama (World Bank, 2019). Suatu negara harus memenuhi hak-hak pembangunan di seluruh lapisan masyrakat. Pro-poor development adalah suatu kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan melalui visi pembangunan nasional (Wardana, 2016). Pengeluaran seseorang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Annisa & Anwar, 2021). Sedangkan, berdasarkan Perpres No 7 tahun 2005 tentang RPJMN, kemiskinan itu bisa dilihat dari segi kekurangan mereka yang mencakup sandang, pangan, dan papan.

Kebijakan menyeluruh dan teratur sangat diperlukan untuk membuat kebijakan guna memberantas kemiskinan yang terjadi karena kemiskinan adalah problem universal

(Endrayani & Dewi, 2016). Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 52,96% penduduk miskin terletak pada pulau jawa. Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang terbanyak kedua penduduk miskin di pulau jawa yaitu dengan 4.572,73ribu jiwa. Jawa Timur sendiri, kontributor terbanyak penduduk miskin adalah berada pada Kabupaten Sampang dengan 23,7%, Kabupaten Sumenep 20,51%, Kabupaten Probolinggo dengan 18,91%. Kabupaten Probolinggo adalah kabupaten keempat dalam banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Probolinggo harus diatasi oleh pemerintah daerah. Probolinggo terletak pada daerah timur Provinsi Jawa Timur atau lebih dikenal dengan Daerah Tapal Kuda. Dalam daerah ini, dianggap wilayah terbelakang karena mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tertinggal dari wilayah lainnya. Ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menjadi terbanyak keempat di Provinsi Jawa Timur.

Kemiskinan yakni reaksi sebuah korelasi antar variasi persoalan yang mencakup, lambatnya progres perekonomian hingga berakibat pada sedikitnya pendapatan perkapita, kesenjangan ekonomi, serta masalah sumber daya yang meliputi kesehatan dan pendidikan (Ariansyah, 2017). Pendapatan perkapita adalah suatu alat untuk mengukur kesejahteraan. Menurut sukirno dalam (Septiani et. al., 2019) menyebutkan imbas kotor dari turunnya tingkat pendapatan penduduk yakni menurunkan tingkat kesejahteraan. Ini dikarenakan penduduk yang menganggur tidak memiliki penghasilan dan akan memperbesar peluang untuk terjerat dalam kemiskinan. Kesenjangan adalah tantangan dalam proses pembangunan yang merata, sedangkan ketimpangan hanya dapat diturunkan saja sehingga bisa memenuhi tergapainya keselarasan dalam pertumbuhan pembangunan daerah.

Sumber daya termasuk dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Sumber daya tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar untuk mengubah nasib seseorang. Tingginya pendidikan bisa menekan angka kemiskinan sehingga pendidikan adalah indikator yang berguna untuk melihat kesejahteraan penduduk (Sudiharta & Sutrisna, 2013). Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari pembangunan dan didalamnya terdapat kesehatan. Kesehatan ialah prasayarat guna meningkatkan produktivitas seseorang untuk menghasilkan sebuah pendapatan yang maksimal (Fatimah & Sa'roni, 2020). Penduduk yang mempunyai kesehatan baik akan menghasilkan produktivitas tinggi untuk bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal. Untuk mendukung proses pendidikan dan kesehatan tersebut, maka diperlukannya peranan pemerintah. Peranan pemerintah yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan dalam menggiatkan kesejahteraan penduduk dan efeknya terhadap pembangunan perekonomian serta pemberantasan kemiskinan, dan kebijakan itu adalah pengeluaran pemerintah (Palaneven, 2018). Dalam penerapan kebijakannya, pemerintah telah mengeluarkan bermacam-macam program melalui instansi sekolah dan pelayanan kesehatan gratis untuk orang miskin. Dalam pengalokasian dana tersebut sangat diperlukan mengingat banyaknya penduduk di Kabupaten Probolinggo hidup dibawah garis kemiskinan dan kesulitan dalam memperoleh kesehatan dan pendidikan yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan pada penduduk yang mempunyai sumber daya rendah, oleh karena itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan utama dan hidup dalam tingkatan yang minim (Susanto & Pangesti, 2020). BPS mengartikan penduduk miskin itu menyandang rataan pengeluaran perkapita dalam sebulannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Kemiskinan mempunyai banyak aspek, hal ini dikarenakan bervariasinya kebutuhan manusia (Putri & Yuliarmi, 2013). Umumnya ada dwi pihak kemiskinan yakni, kemiskinan absolut yang dapat diketahui dari tingkatan pendapatan dan keperluan pokok minimnya serta kemiskinan relatif yang dapat terjadi karena adanya sebuah ketimpangan sosial dimana penduduk mampu mencukupi kebutuhan pokok akan tetapi masih berada dibawah kondisi penduduk yang terdapat di sekitar lingkungannya (Susanto & Pangesti, 2020).

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita yaitu keseluruhan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dari suatu daerah itu. Menurut todaro dalam (Mahendra, 2017) tolak ukur sebuah pembangunan adalah pendapatan perkapita. Ini dikarenakan tujuan dari pembangunan adalah menaikkan pendapatan di masyarakatnya dan kesejaahteraan akan terjaga.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Tenaga kependidikan, masyarakat, dana, dan fasilitas pendidikan baik dalam bentuk barang ataupun uang yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sedikitnya 20persen dari APBN dan 20persen dari APBD.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Tenaga kesehatan, masyarakat, dana, dan fasilitas kesehatan baik dalam bentuk barang ataupun uang yang digunakan untuk penyelenggaraan kesehatan adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Pemerintah mengalokasikan biaya kesehatan sedikitnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

METODE

Data sekunder *time series* periode 11 tahun terakhir mulai tahun 2011-2021 merupakan jenis data untuk penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo untuk data jumlah penduduk miskin dan data pendapatan perkapita, data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bersumber dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sedangkan data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo. Regresi linear berganda model *ordinary least square* (OLS) adalah Metode Analisis penelitian ini, dijalankan bantuan IBM SPSS (*statistics tool for social science*) yang mempunyai tujuan memprediksi ada tidaknya pengaruh antar variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) terhadap variabel tetikatnya yakni jumlah penduduk miskin (Y). Adapaun persamaanya adalah: $Y = \beta0 + \beta1.X1 + \beta2.X2 + \beta3.X3 + e$
Keterangan : Y : variabel terikat (jumlah penduduk miskin); β0: konstanta; β1 β2 β3 : koefisien regresi; X1 X2 X3 : variabel bebas (pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan); e : variabel pengganggu

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921	.847	.782	8892.24131

Sumber: data olahan

Tabel 1 adalah uji koefisien determinasi yaitu dimana menguji besaran pengaruh kekuatan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien *R-square* 0,847. Artinya, 84,7 % seluruh variabel bebas yaitu pendapatan perkapita (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X3) mempegaruhi Jumlah Penduduk Miskin (Y) dan sisanya 15,3% dipegaruhi variabel lain yang tidak dipakai dipenelitian saat ini. Tabel 2 adalah uji simultan (F) dimana mempunyai tujuannya berguna dalam mendapati apakahh seluruh variabel bebas yang dipakai di penelitian ini berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam tabel diatas, memperlihatkan nilai signifikansi 0,003 < α 0,05 atau F hitung 12,965 > F tabel 4,120 menyimpulkan H1 diterima. Artinya, pendapatan perkapita (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3075447474.768	3	1025149158.256	12.965	.003[b]
	Residual	553503688.868	7	79071955.553		
	Total	3628951163.636	10			

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	288188.411	16175.480		17.816	.000
	X1	-.002	.001	-.624	-2.736	.029
	X2	-3.874	1.518	-.432	-2.552	.038
	X3	-2.020	.000	-.013	-.064	.951

Sumber: data olahan

Tabel 3 adalah hasil pengujian parsial t dimana mempunyai tujuan mengukur pengaruh parsial t disetiap variabel bebasnya dan dapat dilihat nilai signifikan harus < α= 0,05. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Pendapatan Perkapita (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, pengeluaran pemerintah Sektor kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Persamaan model dalam penelitian ini adalah: Y = 288188,411 – 0,002 X1 - 3,874 X2 – 2,020 X3

Berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. β0= nilai sebesar 288188,411 artinya, apabila pendapatan perkapita (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X3) konstan, maka jumlah penduduk miskin (Y) di Kabupaten Probolinggo akan naik sebesar 288188,411 jiwa
2. β1= nilai sebesar -0,002 menandakan Pendapatan Perkapita (X1) berpengaruh secara negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Artinya, apabila pendapatan perkapita naik tiap 1 rupiah maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo turun 0,002 jiwa.
3. β2= nilai sebesar -3,874 menandakan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2) berpengaruh secara negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Memiliki arti jika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan naik tiap 1 rupiah, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo turun 3,874 jiwa
4. β3= nilai sebesar -2,020 menandakan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X3) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Y). Berarti jikalau pengeluaran pemerintah sektor pendidikan naik tiap 1 rupiah maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo turun 2,020 jiwa.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo

Pengujian ditunjukkan oleh hasil t-hitung -2,376 > t-tabel -1,895 oleh nilai signifikansi 0,029 < 0,05, berarti H1 diterima. Berarti pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Azizah & Kusuma (2018) dan Thesia & Karmini (2022). Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan perkapita berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dimana pendapatan perkapita penduduk bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Hasil yang diperoleh juga selaras dengan teori Norton bahwa kemiskinan dengan pendapatan perkapita itu berbanding terbalik, jika pendapatan perkapita naik maka penduduk miskin berkurang. Dalam pendapatan perkapita yang tinggi, pasti pertumbuhan PDRB tinggi juga. Ini mengartikan bahwa terdapat banyak pekerjaan yang menciptakan penghasilan maksimal, sehingga

menyebabkan banyaknya sumber penghasil pajak guna pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang lebih banyak lagi bagi masyarakat miskin. ini menyiratkan besarnya pendapatan perkapita menyebabkan kesejahteraan penduduk dalam wilayah itu. Dalam konteks makro, pendapatan perkapita yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan aktivitas perekonomian berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan yang terjadi. Selain itu, dalam perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 selalu menunjukkan kenaikan ditiap tahunnya. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan perkapita di Kabupaten Probolinggo berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin yang terjadi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo

Pengujian ditunjukkan oleh hasil t-hitung -2,552 > t-tabel -1,895 oleh nilai signifikansi 0,038 < 0,05, berarti H1 diterima. Mengartikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil ini sesuai penelitian Idris *et al.*, (2022) serta Hidayat & Azhar (2022) menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Ini mengindikasikan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan dari pemerintah sudah tepat sasaran. Modal penting dalam pembangunan adalah human capital yang didalamnya termasuk pendidikan. Pemerintah mengeluarkan biaya pendidikan minimal 20% dari APBN serta APBD. Kebijakan pemerintah untuk rakyat miskin atau pro poor expenditure salah satunya diterapkan dalam sektor pendidikan, untuk itu pemerintah harus memenuhi pelayanan masyarakat dalam hal pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin guna mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dalam masyarakat. Tingginya tingkatan pendidikan di orang miskin, efeknya untuk menaikkan kompetensi dan diharapkan mereka bisa masuk ke lapangan pekerjaan dan dapat menambah kesejahteraan. Ini juga menyiratkan pengalokasian belanja pemerintah di sektor pendidikan sudah tepat sasaran guna membantu penduduk miskin. Teori Supriyadi menjelaskan bahwa biaya pendidikan berperan sentral dalam pembangunan *human capital* di suatu daerah. Hal ini mengindikasikan anggaran yang ditetapkan pemerintah menunjang pendidikan masyarakat yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana sekolah ataupun lainnya yang terkait dengan pendidikan. Dari anggaran bidang pendidikan itulah bisa meringankan biaya masyarakat dan demikian meningkatkan kesempatan masyarakat untuk merasakan pendidikan serta minat sekolah pun akan meningkat dan juga penduduk miskin dalam suatu wilayah pun akan menurun. Sektor pendidikan adalah sektor mendasar dan mempunyai peran yang sangat penting guna mendorong proses produksi serta aktivitas perekonomian. Dengan menekankan kebijakan perhatian pada sektor pendidikan, akan membantu masyarakat menjadi lebih kompeten dan bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian daerah tersebut.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo

Pengujian ditunjukkan oleh hasil t-hitung -0,064 < t-tabel -1,895 atau nilai signifikansi 0,951 > 0,05, berarti H0 diterima. Artinya, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Hasilnya serupa pada penelitian Hidayat & Azhar (2022) diperoleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan naik, jumlah penduduk miskin turun. Namun, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ini tak selalu signifikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Pemerintah mengalokasikan anggaran minimal sebesar 10% dari APBD diluar gaji di sektor kesehatan. Itu diharapkan pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dalam bekerja sehingga pendapatan yang diperoleh maksimal. Namun, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak selalu signifikan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Ini menyiratkan ada aspek lain yang mengakibatkan anggaran dana yang telah dialokasikan pemerintah dalam sektor kesehatan tersebut tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran

yang dikeluarkan tidak terserap kepada masyarakat yang membutuhkan.

Upaya pemerintah untuk memproporsionalkan dalam menerapkan dan mengelola pembelanjaan untuk bidang kesehatan meliputi semua kalangan, bukan dikhususkan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu saja. Kenyataanya, masih ada penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo tidak pernah merasakan jasa fasilitas kesehatan seperti pelayanan rumah sakit secara maksimal. Dalam konteks makro, baiknya kesehatan penduduk akan bisa meningkatkan produktifitas dalam bekerja sehingga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun permasalahannya, alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan tidak tepat sasaran, sehingga tidak semua masyarakat tidak bisa menikmati layanan fasilitas kesehatan dari pemerintah. Faktornya meliputi kurangnya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan akses menuju fasilitas kesehatan menjadi penyebab masyarakat tidak mampu meningkatkan kesehatannya yang berdampak terhadap kualitas hidup mereka. Dalam peningkatan pengeluaran pemerintahan sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup penduduk dan mampu menjadikan sumber daya manusia yang lebih produktif, akan tetapi kenyataannya layanan kesehatan lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah dan keatas. Karena terbatasnya biaya yang digunakan habis untuk mencukupi keperluan pokoknya beserta faktor jarak tempat tinggal penduduk ke rumah sakit yang jauh menyebabkan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Probolinggo hanya merasakan fasilitas kesehatan terdekat saja seperti puskesmas dan poskedes yang umumnya hanya memiliki fasilitas seadanya dan tidak selengkap fasilitas yang ada di rumah sakit, itu menyebabkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

SIMPULAN

Merujuk terhadap perolehan hasil penelitian, diperoleh bahwa pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupeten Probolinggo. Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan kebijakan dalam mengatasi persoalan penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo yakni diperlukannya kebijakan untuk mendukung masyarakat miskin seperti pengembangan industri rumah tangga melalui program pelatihan. Selain itu, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan guna lebih baik kedepannya serta diperlukannya program prioritas dan tepat sasaran guna anggaran terserap secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. & Anwar, K. 2021. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh), *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(3), 1–6.

Ariansyah, T.S. 2017, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang Tahun 2001-2015, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1–9.

Arifin, A. 2019, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinandi Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(2), 1–15.

Endrayani, N.K.E. & Dewi, M.H.U. 2016, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Undayana*, 5(1), 63–88.

Fatimah, S. & Sa'roni, C. 2020, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 1–9.

Hidayat, A.Y. & Azhar, Z. 2022, Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.

Idris, M.P.A. *et al.* 2022, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Daerah

Istimewa Yogyakarta, *Seminar Nasional Hasil Riset*, 9(1), 45–53.

Mahendra, A. 2017, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara, *JRAK*, 3(1),113–138.

Palaneven, T.O.M. 2018, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.

Putri, I.A.M. &Yuliarmi, N.N. 2013, Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), 441–448.

Septiani, W.T., Zamzami & Mustika, C. 2019, Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan belanja modal Terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 135–148.

Sudiharta, P.S.P. & Sutrisna, K. 2013, Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, *E-Jurnal EP Unud*, 3(10), 431–439.

Susanto, R. & Indah Pangesti. 2020, Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 271–278.

Thesia, D.Y. & Karmini, N.L. 2022, Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Umkm dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(3), 271–280.

Wahyu Azizah, E. & Kusuma, H. 2018, Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.

Wardana, D.P. 2016, Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, *INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 179–191.

World Bank. 2019. *The World Bank Annual Report 2019: Ending Poverty, Investing in Opportunity*. Washington, DC: World Bank.